

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ketahun memerlukan pembiayaan yang semakin besar. Hal ini berarti bahwa usaha pencairan dan penggalan sumber-sumber dana harus digiatkan dan ditingkatkan lagi, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada sehingga pembangunan dalam negeri berjalan dengan baik.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

kepala Desa adalah wakil pemerintah yang memiliki tugas-tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan adanya realisasi otonomi daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pada pasal 33 ayat 3 bahwa

bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kepemimpinan secara luas adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi (Rivai, 2009:2). Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan sangat mempengaruhi kemana arah suatu organisasi dan menentukan tujuan suatu organisasi. Salah satunya adalah pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Kamarudin,dkk. (2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan/PBB adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah atau bangunan tersebut (pemilik atau penyewa). Oleh karena itu Pajak Bumi dan

Bangunan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penangannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini pemimpin sangat berperan penting dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan karena pemimpin puncak utama yang bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi didalam organisasinya. Keterangan di atas memberikan kesimpulan bahwa pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Termasuk kepemimpinan kepala desa yang dimana kepala desa berperan mengatur seluruh aspek yaitu: Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di desa, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan masyarakat, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat desa. termasuk pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

Pada umumnya pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak dilakukan karena, wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya dan bersifat acuh tak acuh dengan alasan belum mendapatkan sosialisasi atau tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh

terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal yang sama juga penulis temui di Desa Kolondama Barat, kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor.

Tabel 1.1
Presentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor

No	Tahun	Jumlah wajib pajak	WP yang membayar	WP yang tidak membayar	Target	realisasi	Presentase (%)
1	2017	64	63	1	Rp. 8.313.050	Rp. 83.050.	99,00
2	2018	64	59	5	Rp.8.313.050	Rp. 1.190.050	85,68
3	2019	64	52	12	Rp. 8.313.050	Rp. 1.663.050	79,99
4	2020	64	44	20	Rp. 8.313.050	Rp. 2.203.050	73,49
5	2021	64	40	24	Rp. 8.313.050	Rp. 5.800.000	69,79

(Sumber data : Desa Kolondama Barat, Kabupaten Alor, 2022)

Dari data diatas menunjukkan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 83.050,000 atau 99,00%. Namun dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan, yakni pada tahun 2018 sebesar 1.190.050 atau 85,65%. Tahun 2019 sebesar 1.663.050 atau 79,99%. Tahun 2020 sebesar 2.203.050 atau 73,49%. Tahun 2021 sebesar 5,800.000 atau 63,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan dari dinas pendapatan daerah kabupaten alor maupun kepala desa Kalondama Barat dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan belum efektif atau belum maksimal terlihat dari tabel penerimaan selama 5 tahun terakhir belum mampu mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan.

Dari data inilah yang menjadi alasan mendasar menggunakan variabel kepemimpinan kepala desa dan sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Miftahul Jannah (2018) dengan judul pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Banteng, dan hasilnya menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zepri Dwi Yuwono (2015) dengan judul pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan yang hasilnya menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Pada kenyataannya, sosialisasi pajak tidak dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat cenderung tidak memahami tentang segala sesuatu yang menyangkut pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah pengaruh kepemimpinan kepala desa dan sosialisasi Pajak terhadap

kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut?
2. Apakah sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi Pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang meneliti dengan kajian yang sama

yaitu pengaruh kepemimpinan kepala desa dan sosialisasi pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalondama Barat Kecamatan Pantar Barat Laut

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.